



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2019

SENIN : 25 JANUARI 2021
EDISI : 00226289/GBP/II/2021

KLIPING

Berita Pertanian



SENIN, 25 JANUARI 2021

- Redefinisi Swasembada Daging (R) 19-20
- Habis Kedelai, Terbitlah Daging Sapi (K) 21-22
- Subsidi Pertanian Naik, Produksi Pangan Stagnan (SI) 23-24

00000000000000000000 000 0000000000000000

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☒ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☒ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 23/1/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 12 /
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☒ Republika	☐ Fajar	☐ Pojok/Karikatur

Waspadai Lonjakan Harga

■ DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan adanya potensi lonjakan harga bawang putih mulai April. Hal itu berdasarkan tren harga sekaligus skenario persediaan bawang putih di dalam negeri yang telah diperhitungkan KPPU.

Komisioner KPPU Taufik Ariyanto mengatakan, tren kenaikan harga selalu terjadi pada semester pertama dalam empat tahun terakhir. Dalam periode tersebut, tren lonjakan harga kerap terjadi mulai April hingga Mei setiap tahunnya.

"Sejak 2017 sampai 2020 selalu terjadi kenaikan pada tiga atau empat bulan awal tahun. Pola ini berulang. Kekhawatiran kita pada 2021 ini akan terjadi pola yang sama," kata Taufik dalam sebuah diskusi secara virtual, Jumat (22/1).

Taufik mengatakan, tren kenaikan harga lebih dini terjadi pada 2020. Tahun lalu, harga mulai bergerak naik pada Februari. Saat itu, rata-rata harga bawang putih melonjak ke level Rp 48.170 per kg dari posisi Januari sebesar Rp 33.376 per kg. Harga baru mulai berangsur turun hingga ke posisi Rp 33.356 per kg pada Mei 2020.

Fenomena itu terjadi lebih awal karena sumber impor bawang putih dari Cina terhambat akibat kebijakan *lockdown*. Namun, pada periode 2017-2019 terjadi pola yang mirip. Harga bawang putih akan melonjak pada kisaran April dan turun mulai Juni. Penurunan harga seiring

mulai masuknya pasokan impor.

KPPU telah memetakan sejumlah skenario konsumsi bawang putih dalam beberapa bulan ke depan. Taufik mengatakan, dalam skenario konsumsi tinggi sebesar 48 ribu ton per bulan tanpa ada tambahan stok impor, pasokan bawang putih pada akhir Maret hanya tersisa 6.484 ton hingga 16.120 ton. Jumlah tersebut sudah tidak mencukupi kebutuhan untuk periode April.

Pada skenario sedang dengan konsumsi sekitar 45 ribu ton, sisa stok akhir Maret berkisar 15.845 ton hingga 25.120 ton. Jumlah itu juga tidak mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap bawang putih pada bulan berikutnya. *R. 23/1/21*

Sementara itu, pada skenario rendah konsumsi diperkirakan 40 ribu ton. Jika diakumulasi selama tiga bulan dengan ketersediaan stok sejak awal tahun, estimasi sisa stok untuk bulan April berkisar 30.845 ton hingga 40.120 ton.

"Jadi, dalam skenario kami, stok di awal April sudah minus di bawah tingkat konsumsi bulanan. Ini akan mendorong terjadinya kenaikan harga seperti yang terjadi di 2017 hingga 2020. Semoga tahun 2021 ini bisa dihindari," kata dia.

Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, pemerintah perlu segera melakukan impor bawang putih untuk 2021.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) menca-

Bawang Putih

tat, kenaikan harga bawang putih sudah terlihat sejak pertengahan 2020. Rata-rata harga bawang putih berkisar Rp 23.600 per kilogram (kg) pada Juli 2020. Memasuki awal 2021, harga bawang putih telah bertengger di level Rp 28.350 per kg.

"Pergerakan harga di pasar sudah cukup menunjukkan sejauh mana ketersediaan bawang putih di pasar," kata Felippa.

Ia mengatakan, pergerakan harga tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kementerian Pertanian pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR yang menyebut total kebutuhan bawang putih nasional sebesar 591.596 ton.

Sementara itu, produksi dalam negeri hanya berjumlah sekitar 59.032 ton. Sehingga, terdapat kekurangan sekitar 532 ribu ton. Sementara itu, menjelang Hari Raya Imlek, Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, Felippa mengatakan, kemungkinan besar akan terjadi peningkatan permintaan bawang putih di pasar. ■ *ed: ahmad fikri noor*

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 25/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 6 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

Februari, Sapi Impor Datang

SEBANYAK 281.867 ton sapi bakalan setara daging dan daging beku impor akan datang pada Februari 2021. Kedatangan daging impor tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan kecukupan ketersediaan sapi siap potong.

"Mulai Februari, untuk tanggalnya masih tentatif. Daging yang diimpor terdiri dari sapi bakalan dan daging sapi," kata Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian (Kementan) Syamsul Maarif kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Dia menambahkan sapi bakalan dan siap potong tersebut akan didatangkan dari Meksiko dan Australia.

Secara terpisah, Ketua Harian Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Asnawi berharap pemerintah melakukan impor sapi siap potong dan daging sapi pada pertengahan Maret 2021. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi kenaikan harga jelang bulan Ramadan. "APDI merekomendasikan pemerintah waktu yang tepat untuk mendatangkan impor sapi ialah pertengahan Maret 2021," ujarnya. 1/1/20

Dengan pertimbangan sapi siap potong impor itu menjelang Ramadan pada 13 April sudah siap masuk jagal dan masa rekondisinya sudah selesai.

Dia menambahkan, jika mengandalkan sapi bakalan, waktunya tidak mungkin karena sapi tersebut harus digemukkan selama 3-4 bulan ke depan. Sehingga yang paling tepat ialah mengambil sapi siap potong.

"Sapi (siap potong) itu hanya masuk karantina, rekon-disi 2-3 minggu saja. Saya berharap masuknya sapi siap potong itu di pertengahan Maret," ujar Asnawi.

Dia juga memastikan bahwa para pedagang daging di wilayah Jabodetabek sudah kembali berdagang setelah melakukan aksi mogok dari 20-22 Januari 2021. "Pedagang daging hari ini sudah kembali beroperasi dari kemarin (Sabtu, 23/1) karena mogok akhir sampai Jumat (22/1), artinya Sabtu itu penjual daging seluruh Jabodetabek 100% sudah berdagang," katanya.

Untuk saat ini, kata dia, harga timbang karkas di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) naik sekitar 9% menjadi Rp94ribu/kg dari sebelumnya di harga Rp87ribu/kg. Dengan kenaikan itu, harga jual ke konsumen saat ini Rp120-125 ribu/kg dari sebelumnya Rp95 ribu-Rp120 ribu/kg.

Menurut Asnawi, kenaikan harga sapi sendiri berawal dari negara produsen yang melakukan kenaikan harga kepada importir. (lam/E-3)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 25/1/2021
HALAMAN 10 /
RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Berita Foto
☐ Opini/Artikel
☐ Tajuk
☐ Pojok/Karikatur |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | |

DAGING SAPI

Sapi Lokal Jadi Solusi Sementara

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia bisa mengoptimalkan sapi lokal dan mencari alternatif impor guna mengatasi defisit daging sapi dalam jangka pendek. Sebab, kenaikan harga sapi ternak hidup di Australia, sumber utama impor sapi bakalan dan daging sapi Indonesia, diperkirakan berlanjut tahun ini.

Riset "Agricultural Outlook" di laman resmi Departemen Pertanian, Air, dan Lingkungan Australia menyebutkan, rata-rata harga sapi ternak hidup 2020-2021 diperkirakan 23 persen lebih tinggi dibandingkan periode tahun sebelumnya. Sementara konsumsi daging global terus meningkat sepanjang 2019-2024. Permintaan China dan Indonesia menjadi faktor pendorongnya.

Terkait dinamika harga sapi ternak hidup di Australia, Direktur Eksekutif Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia Djoni Liano menilai, sapi lokal seharusnya bisa memenuhi permintaan dalam negeri. Syaratnya, distribusi dan logistiknya tidak terhambat, khususnya untuk wilayah DKI Jakarta.

"Sapi lokal bisa dimobilisasi dari daerah-daerah tertentu. Saya mendapat laporan, ada daerah yang sedang kesulitan menjual sapi," ujarnya saat dihubungi, Minggu (24/1/2021).

Permintaan masyarakat terhadap daging sapi, menurut

Djoni, menurun 40 persen selama pandemi Covid-19. Produksi domestik rata-rata mampu memenuhi permintaan daging 60 persen. Artinya, daging sapi lokal berpeluang mengisi pasar, terutama untuk menghadapi kenaikan permintaan pada Ramadhan-Lebaran pada April-Mei 2021.

Meski demikian, Djoni mengatakan, stok lokal mesti diperkuat pasokan impor. Pada Ramadhan-Lebaran tahun lalu, sapi bakalan impor yang mengisi pasar 80.000-100.000 ekor. Tahun ini, kebutuhannya diperkirakan tidak jauh beda.

Salah satu sumber impor sapi hidup alternatif adalah Meksiko. "Namun, kalau mengimpor dari Meksiko, perhatikan lama pengirimannya hingga tiba di Indonesia. Impor dari Australia bisa sampai kira-kira 7 hari, sedangkan dari Meksiko berkisar 26 hari," katanya.

Menurut Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomis Pertanian Indonesia sekaligus Wakil Menteri Perdagangan periode 2011-2014 Bayu Krisnamurthi, Indonesia dapat mengimpor sapi ternak hidup dari Meksiko karena bebas penyakit mulut dan kuku. Namun, sapi yang diimpor sebaiknya yang siap potong karena untuk memenuhi kebutuhan Ramadhan-Lebaran.

Selain sapi ternak hidup, menurut Bayu, Indonesia juga

membutuhkan impor daging sapi beku untuk memenuhi permintaan selama Ramadhan-Lebaran.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian Syamsul Maarif, dalam keterangannya di situs Kementerian Pertanian, menyebutkan, stok daging sapi dan kerbau mencukupi kebutuhan. Tahun ini, kebutuhan diperkirakan mencapai 696.956 ton, sedangkan produksi domestik 425.978 ton.

Selain itu, juga ada 47.836 ton daging sapi/kerbau impor dan sapi bakalan dari tahun 2020. Dengan demikian, total stok tahun ini 473.814 ton sehingga defisit daging sapi 223.142 ton. "Pemerintah akan mengimpor 502.000 ekor sapi bakalan yang setara 112.503 ton daging, impor daging sapi 85.500 ton, serta impor daging sapi Brasil dan daging kerbau India 100.000 ton. Stok akhir 2021 diperkirakan 58.725 ton," ujarnya.

Dalam situasi saat ini, menurut Djoni, masyarakat bisa mengalihkan kebutuhan daging sapi ke pangan sumber protein hewani lain, seperti telur dan daging ayam serta ikan.

Menurut Bayu, peralihan ke pangan sumber protein lain memungkinkan karena konsumen Indonesia rasional, tetapi hal itu perlu didukung informasi logis terkait penyebab kenaikan harga. (JUD)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 24/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 4 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

Harga Daging Sapi Lokal Naik

Pengurangan impor sapi bakalan dari Australia mendongkrak harga jual daging sapi di Lampung. Namun, di Boyolali, Jawa Tengah, harga sapi potong cenderung turun selama pandemi ini.

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS—Sarjono (49), peternak sapi asal Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, mengatakan, saat ini harga jual daging sapi lokal di tingkat peternak Rp 44.000-Rp 45.000 per kilogram hidup. Harga jual itu meningkat dibandingkan beberapa pekan lalu yang hanya Rp 41.000-Rp 42.000 per kilogram hidup.

Kenaikan harga itu diyakini dampak dari pengurangan impor sapi bakalan asal Australia. "Bagi kami, peternak lokal, kondisi ini membawa berkah karena harga sapi lokal naik," kata Sarjono saat dihubungi, Sabtu (23/1/2021). *ke-24/1/21*

Menurut dia, sejauh ini pasokan bibit sapi lokal juga tidak ada kendala. Kendati begitu, harga jual bibit sapi lokal naik Rp 500.000-Rp 1 juta per ekor. Selama ini, pasar utama peternak sapi lokal Lampung adalah pulau induknya sendiri, yaitu Sumatera. Namun, beberapa hari terakhir, permintaan untuk memenuhi konsumsi di Jabodetabek juga meningkat.

Ketua Asosiasi Peternak dan Pegiat Sapi Lokal Lampung Nang P Subendro mengatakan, permintaan daging sapi untuk

wilayah Jakarta dan sekitarnya naik sekitar 25 persen. Kondisi itulah yang ikut memicu kenaikan harga jual daging sapi lokal di tingkat peternak.

Dia menilai, pengurangan impor daging sapi bakalan asal Australia justru membawa dampak positif bagi peternak sapi lokal. Kenaikan harga jual daging sapi di tingkat peternak juga semakin menggairahkan bisnis peternakan sapi lokal.

Dia berharap pemerintah berkomitmen mendukung konsumsi sapi lokal dengan mengatur kebijakan impor daging sapi secara tepat. Pemerintah diharapkan tidak mengambil jalan pintas dengan membuka impor daging beku secara besar-besaran. Hal itu akan membuat harga jual daging sapi lokal anjlok dan peternak lokal gulung tikar.

Pemasaran daging beku juga dinilai perlu menyertakan keterangan jelas tentang jenis daging dan asalnya. Dengan begitu, konsumen tahu produk yang dibeli merupakan daging kerbau beku asal India. Pemasaran daging impor beku yang tidak diatur secara tepat disinyalir dimanfaatkan sejumlah pedagang untuk berbuat curang

dengan mencampur daging beku dengan daging lokal segar. Hal ini merusak kualitas dan harga jual daging sapi lokal.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu mengantisipasi ketersediaan stok sapi bakalan lokal. Hal ini penting agar industri peternak lokal tidak terganggu akibat menurunnya stok sapi bakalan lokal. Kondisi sekarang ini dapat menjadi momentum pemerintah untuk mengembangkan industri peternakan sapi lokal.

Untuk mendorong industri peternakan sapi lokal, pemerintah perlu memberikan insentif bagi pelaku usaha peternak pembiakan sapi lokal. Selain pinjaman modal dengan bunga rendah, pemerintah juga perlu menjaga harga jual daging sapi lokal. Harga jual daging sapi yang saat ini Rp 44.000-Rp 45.000 per kilogram hidup dinilai sudah cukup baik bagi peternak.

Dia berharap harga jual daging sapi lokal bisa lebih baik di rentang harga Rp 48.000-Rp 50.000 per kilogram hidup. Harga jual itu dinilai ideal bagi perkembangan industri peternak lokal dan masih dapat dijangkau oleh konsumen.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 24/1/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 4/1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☒ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika	☐ Fajar	☐ Potok/Karikatur

Terdampak pandemi

Berbeda dengan Lampung, kenaikan harga daging sapi di Jabodetabek tidak berdampak pada keuntungan para peternak di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, salah satu daerah penghasil sapi potong terbanyak di provinsi itu.

Bakri (55), peternak asal Desa Winong, Kecamatan Boyolali, kemarin mengatakan, pandemi Covid-19 benar-benar berdampak pada usaha penggemukan sapi. Jika biasanya membeli sapi Rp 17 juta per ekor, dalam 3-4 bulan akan dijual seharga Rp 21 juta-Rp 22 juta. Namun, di masa pandemi, harga jual hanya Rp 20 juta.

"Yang saya dengar, penyebabnya memang permintaannya. Misalnya, biasanya dikirim 20-30 ekor sekali kirim, sekarang hanya 10 ekor. Berkurang sekitar 50 persen. Sebelumnya, sapi jantan yang baru lahir harganya tinggi, sekarang biasa saja. Peternak sekarang cenderung memilih sapi untuk diperah," kata Bakri.

Meski demikian, Ketua Asosiasi Peternak Sapi Indonesia (Aspin) Boyolali Suparno mengatakan, tingginya harga sapi impor dari Australia dapat menguntungkan peternak sapi lokal. Ia berharap pemerintah berkomitmen mendorong konsumsi sapi lokal. Keberpihakan pemerintah terhadap sapi lokal dinanti kalangan peternak.

"Harapannya memang ada keberpihakan terhadap peternak lokal. Dengan kondisi sekarang, sebenarnya sapi lokal diuntungkan. Apabila nantinya tetap mengimpor, itu pasti akan berpengaruh ke peternak lokal," kata Suparno.

Suparno menambahkan, harga sapi potong lokal juga perlahan meningkat sejak akhir 2020. Dari semula berkisar

Rp 20 juta per ekor bisa menjadi Rp 23 juta per ekor. Jika dihitung per kilogram, harganya dari Rp 43.000 per kilogram menjadi Rp 47.000 per kilogram.

Akan tetapi, Suparno menyatakan, kenaikan harga sapi lokal itu tidak juga dirasakan kalangan peternak. Hal ini disebabkan rendahnya daya beli masyarakat. Penurunan daya beli ini diduga akibat adanya pandemi Covid-19. Penurunan daya beli diperkirakan 40-50 persen dibandingkan dengan kondisi normal tanpa adanya pandemi.

Suparno mengatakan, rendahnya daya beli masyarakat dapat dilihat dari berkurangnya hewan yang dipotong dari satu rumah pemotongan hewan (RPH). Ia mencontohkan, di Boyolali, satu RPH yang biasa memotong 50 sapi per hari, saat ini hanya memotong 25 sapi per hari.

Di luar masalah harga dan rendahnya penjualan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng Lalu M Syafriadi menuturkan, ketersediaan daging sapi di Jateng mencapai 398.000 ton. Penghitungan itu, jika merujuk pada populasi sapi usia potong di provinsi tersebut, yakni 1,7 juta ekor. Pada angka tersebut, kebutuhan daging sapi di Jateng dinilai aman.

Di tingkat peternak, di Jateng, harga sapi per ekor yang siap penggemukan menurun. "Biasanya harga rata-rata sapi dengan berat sekitar 300 kg, pada tujuh bulan sebelum Idul Adha, Rp 16 juta, nanti akan laku Rp 20 juta setelah dipelihara. Namun, bulan-bulan ini harganya menurun berkisar Rp 1-2 juta. Sementara daging sapi konsumsi relatif stabil berkisar Rp 110.000-120.000 per kg," kata Lalu. (VIO/NCA/DIT)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 23/1/2020 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

Imbas Pedagang Mogok

KPPU Investigasi

Kenaikan Harga Daging

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ikut menyoroti kenaikan harga daging sapi yang tak wajar di pasaran. Lembaga pengawas itu siap melakukan investigasi jika ada indikasi pelanggaran persaingan usaha.

Sapi Di

Pasar

WAKIL Ketua KPPU Guntur Saragih mengaku, pihaknya tengah mendalami masalah tersebut.

"Masih terus kami lihat, apakah mahalnya daging ini karena ada intervensi yang mengarah ke pelanggaran persaingan usaha atau tidak," ujarnya dalam diskusi virtual, kemarin.

Menurut Guntur, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong harga daging sapi meroket. Selain, kemungkinan dugaan pelanggaran persaingan usaha, situasi lain seperti mahalnya suplai lantaran keterbatasan stok, turut menjadi faktor penentu.

Namun, sampai saat ini KPPU belum mulai masuk ke tahap penelitian. KPPU juga belum dapat menyimpulkan adanya pelanggaran pada kasus naiknya harga daging. *Rm/23/1/16*

"Kami masih terus memantau karena kenaikan harga terjadi khusus di Jabodetabek," katanya.

Guntur memastikan, masalah harga daging sapi kali ini berbeda dengan perkara yang pernah diusut KPPU pada 2016.

Pada 2016, KPPU menemu-

kan adanya kartel daging oleh sejumlah importir. Perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim KPPU.

Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, Pemerintah perlu membenahi tata niaga daging sapi nasional.

Menurut dia, tingginya harga daging sapi perlu diatasi dengan melihat ke persoalan di hulu. Salah satunya, karena rantai distribusi yang panjang.

Panjangnya rantai distribusi menimbulkan biaya tambahan yang tidak sedikit. Akhirnya, berpengaruh kepada harga jual.

Felippa menuturkan, rantai panjang distribusi dimulai dari Pemerintah yang memilih mengimpor sapi. Kemudian, digemukkan lagi dan dipotong di Indonesia.

Setelah itu, daging sapi yang dihasilkan dapat dijual langsung ke pedagang grosir berskala besar di pasar atau melalui tengkulak yang membantu RPH (Rumah Pemotongan Hewan) untuk mendapatkan pembeli. Barulah menjual daging sapi ke

pedagang grosir berskala kecil. "Merekalah yang menjual daging sapi ke pedagang eceran di pasar tradisional atau supermarket, sebelum akhirnya sampai di tangan konsumen. Proses panjang ini tentu menimbulkan biaya tambahan yang tidak sedikit," jelas Felippa.

Terkait rencana impor untuk menyelesaikan masalah ini, menurut Felippa, itu langkah strategis yang bisa dilakukan. Apalagi mempertimbangkan adanya siklus tahunan kenaikan permintaan jelang Ramadan dan Idul Fitri.

Menurut dia, impor bisa jadi kebijakan efektif kalau diikuti data yang akurat dan perkiraan waktu yang tepat dalam eksekusinya.

"Sistem kuota sudah terbukti rawan pelanggaran. Ini perlu dievaluasi oleh Pemerintah," tegasnya.

Penuhi Tuntutan

Sementara, para pedagang

daging sapi menghentikan aksi mogok jualan. Pasalnya, Pemerintah menanggapi secara serius tuntutan asosiasi pedagang.

Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Asnawi mengatakan, tuntutan yang dipenuhi itu khususnya terkait stabilisasi harga dan kelancaran pasokan daging sapi.

"Kami mengimbau kepada teman-teman pedagang daging, mohon kiranya sudah berdagang kembali," ajaknya.

Asnawi mengungkapkan, tuntutan yang dipenuhi, pertama, tuntutan menstabilkan harga sapi potong di tingkat *feedloter*, RPH dan harga di pasaran.

Kedua, memastikan kelancaran dan ketersediaan pasokan sapi potong dan daging untuk pedagang. Ini dikabulkan dengan penetapan harga timbang karkas

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 23/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

di RPH tidak lebih dari Rp 94 ribu per kilogram (kg), atau setara dengan timbang hidup sapi Rp 46 ribu - Rp 47 ribu per kg.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Suhanto mengatakan, stok daging sapi saat ini masih tersedia. Pemerintah menjamin permintaan daging sapi di pasar rakyat dapat terpenuhi.

"Saat ini stok daging sapi tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kementerian Perdagangan terus berupaya menjaga stok agar masyarakat tetap memiliki akses ke daging sapi," katanya.

Suhanto mengaku, Kemendag telah berkoordinasi dengan APDI. Kemendag juga telah bertemu dengan para importir sapi bakalan dan mengimbau untuk membantu menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga sapi bakalan sampai di RPH. ■ KPJ

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 23/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

Konsentrasi Dampak di Jabodetabek

Gejolak harga daging sapi dinilai hanya terkonsentrasi di Jabodetabek. Pemerintah menjamin stok daging mencukupi kebutuhan masyarakat.



KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pedagang daging yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Jakarta beristirahat di lapaknya saat mogok berdagang di Pasar Jatinegara, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Aksi selama tiga hari hingga Jumat (22/1) itu digelar sebagai bentuk protes atas kenaikan harga daging sapi impor. Menurut pedagang, kenaikan itu berdampak pada turunnya keuntungan sebab mereka tidak dapat menaikkan harga sekehendaknya karena terikat oleh aturan harga eceran di tingkat konsumen.

JAKARTA, KOMPAS — Dampak kenaikan harga daging sapi dan sapi bakalan impor asal Australia diperkirakan paling terasa di DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. Sebab, selain sepenuhnya mengandalkan pasokan dari luar provinsi dan luar negeri, wilayah ini menjadi konsentrasi utama konsumen daging sapi di Indonesia.

Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University Muladno dalam dialog yang digelar Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPD), Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), serta IPB University, Jumat (22/1/2021), mengatakan, wilayah yang kekurangan daging sapi adalah DKI Jakarta dan sekitarnya, bukan Indone-

sia secara keseluruhan. Jabodetabek jadi sentra konsumen yang selama ini mendapat pasokan daging dari luar daerah dan dari hasil importasi. Oleh karena harga daging sapi dan sapi bakalan impor terus naik, para pedagang daging sapi di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi mogok berjualan selama tiga hari hingga

Jumat (22/1). Kenaikan itu dinilai menekan margin. Menurut Muladno, gejolak harga daging sapi di Jabodetabek perlu disikapi serius. Sebab, delapan provinsi dengan populasi sapi terbanyak tak sanggup memenuhi kebutuhan Jabodetabek, seperti Jawa Timur dengan 4,76 juta ekor, Jawa Tengah (1,75 juta ekor), Su-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 23/1/2021
HALAMAN 2 / 1
RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Berita Foto
☐ Opini/Artikel
☐ Tajuk
☐ Pojok/Karikatur |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | |

lawesi Selatan (1,36 juta ekor), NTB (1,24 juta ekor), dan NTT (1,09 juta ekor). 22/1/21

Sementara alternatif impor di luar Australia, seperti Brasil dan Meksiko, relatif mahal karena secara geografis terlalu jauh jaraknya. Adapun sapi bakalan jantan di Indonesia juga umumnya disiapkan untuk hari raya Idul Adha dan sapi betina terlarang untuk dipotong menurut undang-undang.

Beberapa solusi yang bisa ditempuh pemerintah, kata Muladno, adalah melonggarkan aturan impor sapi bakalan untuk Jabodetabek, memperketat daging impor hanya untuk bahan baku industri, serta mengonsolidasikan peternak kecil dan mendampingi agar perannya lebih besar.

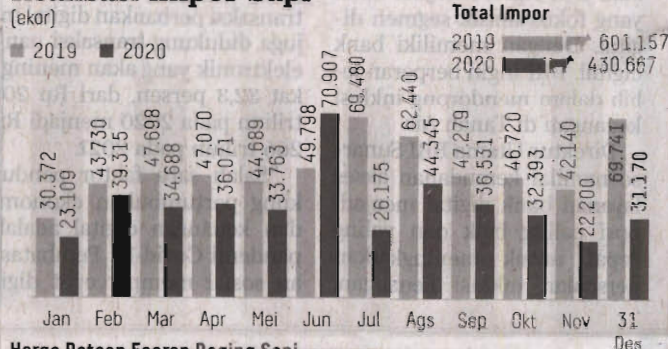
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia Didiek Purwanto menambahkan, mayoritas kebutuhan daging sapi di Jabodetabek mengandalkan pasokan dari usaha penggemukan yang bakalannya impor. Oleh karena itu, ketika suplai di negara asal terganggu, Jabodetabek segera terdampak. Ke depan, Indonesia mesti berdiskusi agar keluar dari jebakan ketergantungan impor.

Mencukupi

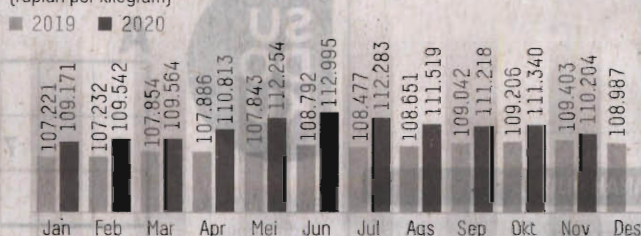
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian Syamsul Maarif dalam keterangannya menyebutkan, stok daging sapi dan kerbau mencukupi kebutuhan. Tahun ini, kebutuhannya diperkirakan mencapai 696.956 ton, sementara produksi dalam negeri 425.978 ton.

Selain itu, ada 47.836 ton daging sapi/kerbau impor dan sapi bakalan dari tahun 2020.

Realisasi Impor Sapi



Harga Rataan Eceran Daging Sapi

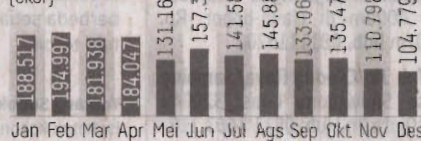


Harga Rataan

(rupiah per kilogram)

2016	106.565
2017	107.311
2018	107.237
2019	108.383

Stok Akhir 2020



Sumber: BPS dan Papanar Gapuspindo (Jumat, 22/1/2021)

INFOGRAFIK ARJENDRO

Dengan demikian, total stok tahun ini 473.814 ton sehingga defisit daging sapi 223.142 ton. "Pemerintah akan mengimpor 502.000 ekor sapi bakalan yang setara 112.503 ton daging, impor daging sapi 85.500 ton, serta impor daging sapi Brasil dan daging kerbau India 100.000 ton. Stok akhir 2021 diperkirakan 58.725 ton," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah menyebutkan, potensi produksi daging sapi dan kerbau dalam negeri mencapai 28.790 ton pada bu-

lan Januari. Sementara kebutuhan konsumsi lebih kurang 56.720 ton. Defisit ini akan dipenuhi dari stok daging impor yang per 14 Januari mencapai 21.980 ton. Rinciannya, 15.160 ton di BUMN dan 6.830 ton di pelaku usaha/asosiasi.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir akan terjadi kekurangan daging sapi dan kerbau. Sebab, stok daging yang ada mencukupi kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto melalui keterangan pers, Jumat

(22/1), menyampaikan hal senada. Stok daging sapi tersedia dan mencukupi kebutuhan nasional. Namun, ada kenaikan harga karkas 11,6-12,6 persen di tingkat rumah pemotongan hewan pada Januari 2021.

Penyesuaian harga karkas ditempuh seiring naiknya harga sapi bakalan asal Australia, yakni dari 2,8 dollar AS per kilogram berat hidup pada Juni 2020 menjadi 3,78 dollar AS per kilogram berat hidup pada Januari 2021. Kenaikan itu dipicu oleh program pemulihan populasi, pemenuhan permintaan konsumsi dalam negeri, serta peningkatan permintaan dari negara lain ke Australia, terutama dalam tiga bulan terakhir.

Sementara itu, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI bersama BUMN di kluster pangan bersiap membantu stabilisasi harga daging. Guna memastikan ketersediaan daging, RNI bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kadin DKI, PT Berdikari (Persero), Asosiasi Pedagang Daging Indonesia, serta PD Pasar Jaya dan PD Dharma Jaya.

"Kami sedang mempersiapkan stok daging sapi dan kerbau untuk disalurkan ke pasar-pasar tradisional," kata Direktur Utama RNI Arief Prasetyo Adi. (MKN)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 25/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

Pemerintah Siapkan Rp 5,57 Triliun untuk Peremajaan Sawit Rakyat

Oleh **Arnoldus Kristianus**

► **JAKARTA** – Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengalokasikan dana Rp 5,57 triliun untuk memenuhi target peremajaan sawit rakyat (PSR) seluas 180 ribu hektare (ha) tahun ini. Salah satu tujuan PSR adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas tandan buah segar (TBS) sawit nasional.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, di masa pandemi Covid-19, pemerintah melalui BPDPKS tetap berkomitmen untuk mendukung subsektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah komoditas strategis nasional. Dukungan tersebut tercermin melalui keputusan rapat Komite Pengarah BPDPKS pada Jumat (22/1) yang telah menyetujui usulan alokasi anggaran BPDPKS tahun 2021. "Dukungan yang utama adalah pemenuhan target PSR pada 2021 seluas 180 ribu ha dengan alokasi dana Rp 5,57 triliun," ujar Airlangga usai memimpin rapat tersebut, kemarin. Untuk mencapai target itu, BPDPKS bersama seluruh pemangku kepentingan industri sawit akan menyusun mekanisme PSR yang lebih efektif dan efisien.

Menko Airlangga menuturkan, pemerintah melalui BPDPKS juga tetap berkomitmen untuk mendukung program mandatori biodiesel 30% (B30)



Airlangga Hartarto

pada 2021 dengan target alokasi penyaluran sebesar 9,20 juta kiloliter (kl). Komitmen pemerintah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) dan menjaga surplus neraca perdagangan nonmigas yang sekitar 12% berasal dari ekspor produk sawit dan turunannya. Dengan demikian, target 23% bauran energi berasal dari Energi Baru Terbarukan

(EBT) pada 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) diharapkan dapat tercapai.

Pemerintah membentuk BPDPKS pada 2015 dan mulai menggulirkan program PSR sejak 2016 dengan menggunakan dana pungutan ekspor (PE) sawit yang dikelola BPDPKS. Pada 2016-2020, program PSR menjangkau 200.205 ha milik 87.906 pekebun, total dana yang disalurkan BPDPKS mencapai Rp 5,32 triliun. Pada 2016, realisasi PSR hanya 254 ha, tapi pada 2017 menjadi 2.932 ha, 2018 seluas 12.524 ha, 2019 seluas 90.642 ha, dan 2020 seluas 94.033 ha. Pemerintah menargetkan PSR menjangkau 500 ribu ha pada 2020-2022.

Sementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyatakan, produktivitas sawit Indonesia hingga kini masih menjadi catatan besama, untuk itu Bappenas mengusulkan tujuh langkah untuk meningkatkan produktivitas komoditas itu. Langkah tersebut adalah penerapan kebijakan perkebunan perlu mengarah pada peningkatan efisiensi produksi dan produktivitas, pemanfaatan teknologi maju dan canggih, dan pertanian presisi. Selanjutnya, penggunaan bibit berkualitas, peremajaan tanaman perkebunan kelapa sawit, penerapan praktik pertanian yang baik (*good agricultural practices/GAP*), serta penguatan penyuluhan dan pendampingan sektor

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 25/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 11 |
| ☒ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

perkebunan.

Mengingat sawit dimanfaatkan juga untuk industri pangan, program peningkatan produktivitas itu perlu sejalan dengan arah kebijakan negara konsumen. Dalam Kesepakatan Hijau Eropa, pengembangan sawit perlu memperhatikan arah kebijakan Uni Eropa yakni pertanian presisi, pertanian organik, *agroforestry*, *animal welfare*, mengurangi emisi, mengurangi penggunaan pupuk, pestisida dan antibiotik (kimia), pengurangan kehilangan dan limbah pangan (*food loss and waste*), memperkuat transportasi, penyimpanan dan pengemasan pangan, pengolahan pangan berkelanjutan, dan *digital platform* untuk informasi pangan.

Karena itu, tulis keterangan Tim Komunikasi Publik Kementerian PPN/Bappenas, usulan kebijakan Bappenas (terkait produktivitas) penting bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas sawit, tetapi juga menyelaraskan kebijakan dengan negara konsumen. Harapannya, usulan itu dapat memenuhi permintaan sawit nasional dan global, serta dapat mendorong terciptanya inovasi produk dari bahan sawit yang siap diekspor. Saat ini, perkebunan swasta mampu menghasilkan sawit 4,08 ton per ha, perkebunan negara 3,68 ton per ha, dan rakyat 3,07 ton per ha. Terdapat gap cukup besar antara produktivitas dan potensinya, potensi mencapai 7,50 ton per ha sedangkan rata-rata produktivitas sawit di Indonesia hanya 3,60 ton per ha

Menuju Potensi

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (*Paspi*) Tungkot Sipayung menjelaskan, pemerintah memang harus mendorong produktivitas kelapa sawit nasional, tidak hanya terhadap sawit yang dikelola petani yang saat ini telah berjalan melalui PSR tapi juga sawit yang dikelola korporasi. Dengan cara itu

pula, Indonesia ke depan tidak perlu menambah areal lahan dalam menggenjot produksi sawit nasional. "Saat ini bukan lagi saatnya menambah areal lahan untuk meningkatkan produksi tapi dengan peningkatan produktivitas, baik pada sawit petani maupun korporasi swasta," kata dia kepada *Investor Daily*, kemarin.

Rata-rata produktivitas sawit nasional saat ini memang masih rendah yakni 4 ton CPO per ha per tahun, padahal Malaysia sudah bisa 6 ton per ha per tahun. Salah satu penyebabnya adalah tanaman sawit di Indonesia umumnya masih generasi pertama atau belum pernah diremajakan sehingga secara alamiah terjadi penurunan produktivitas. "Potensi produktivitas sawit Indonesia itu bisa sampai 8 ton CPO per ha per tahun, tapi realisasi produktivitas sawit nasional saat ini masih 50% dari potensi. Apabila Indonesia bisa meningkatkan hingga 2 ton per ha per tahun, yakni dari 4 menjadi 6 ton per ha per tahun, bangsa ini sudah bisa mendapatkan tambahan 32 juta ton CPO per ha per tahun, ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik dan juga menyuplai pasar ekspor, manajemen suplai yang

demikian membuat Indonesia bisa mendiket pasar dunia," ujar Tungkot.

Menurut Tungkot, upaya yang bisa dilakukan untuk me-

namah produktivitas hingga 2 ton CPO per ha per tahun di antaranya dengan penggunaan varietas yang lebih unggul dan perbaikan kultur teknis pemupukan. Indonesia sudah memiliki varietas unggul sawit, pun dengan pupuk. Saat ini, upaya pemupukan masih di bawah optimal, padahal pemupukan sangat penting, tanpa pupuk pohon sawit bisa tak berbuah. "Rata-rata pemupukan sawit secara nasional baru 5 kilogram (kg) per pokok tanaman, padahal idealnya 10 kg, jadi naikan pupuk dua lipat. Upaya ini juga perlu menjadi perhatian para korporasi, tidak hanya pemerintah sepenuhnya," kata Tungkot. (tl)

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 25/1/2021
HALAMAN 9 / 1
RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Berita Foto
☐ Opini/Artikel
☐ Taluk
☐ Pojok/Karikatur |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | ☐ Fajar | |

Pupuk Indonesia Perkuat Stok di Gudang

■ MUHAMMAD NURSYAMSI

JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) terus memperkuat ketersediaan pupuk di gudang-gudang lini tiga atau gudang kabupaten di seluruh Indonesia. Langkah tersebut untuk mengantisipasi tingginya permintaan menyambut musim tanam awal tahun ini.

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gusrizal mengatakan, hal itu dilakukan agar pendistribusian ke distributor dan kios-kios bisa lebih cepat memenuhi kebutuhan petani. Saat ini, kata dia, stok pupuk bersubsidi yang telah siap di gudang kabupaten secara nasional berjumlah 1.228.154 ton.

Gusrizal juga mengatakan, saat ini terdapat 226.904 ton pupuk yang posisinya sudah di distributor dan kios. "Namun, angka ini tentunya sangat dinamis mengingat tingginya permintaan saat ini," ujar Gusrizal di sela inspeksi gudang-gudang dan kios di wilayah Karawang, Purwakarta, dan Subang, Ahad (24/1).

Gusrizal menyebutkan, Pupuk Indonesia mendorong para distributor mempercepat proses penebusan ke gudang agar kios-kios bisa segera menyalurkan pupuk ke petani. Pupuk Indonesia sudah menerbitkan surat untuk meminta distributor mempercepat penebusan.

Gusrizal mengatakan, serapan saat ini cukup tinggi, terutama di wilayah lumbung pangan seperti Jawa Barat. Faktor kecepatan distribusi dari gudang ke distributor dan kios menjadi sangat krusial. "Oleh karena itu kami menjaga jangan sampai gudang di kabupaten ini kekurangan stok," ujar Gusrizal.

Wilayah dengan stok tertinggi saat ini adalah Jawa Timur sebesar 240.547 ton, disusul Jawa Barat sebesar 98.536 ton. Ada-

pun total rincian stok pupuk berdasarkan jenisnya, terdiri atas 519.296 ton urea, 408.984 ton NPK, 105.786 ton SP36, 101.540 ton ZA, dan 92.980 ton organik.

Menurut Gusrizal, cuaca menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam distribusi pupuk pada awal tahun ini. Hal ini disebabkan kegiatan bongkar-muat di gudang dan di kios butuh perhatian ekstra untuk memastikan kualitas pupuk dan keselamatan kerja yang menjadi prioritas Pupuk Indonesia.

Gusrizal juga mengingatkan, sesuai Permentan Nomor 49 Tahun 2020, petani yang berhak memperoleh pupuk bersubsidi adalah mereka yang tergabung dalam kelompok tani, sudah menyusun dan mendaftarkan dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK), dan di daerah tertentu, mempunyai kartu tani.

Pupuk Indonesia menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi dan dosis yang telah ditentukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Gusrizal menyampaikan, jumlah alokasi pupuk bersubsidi pada 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi total sebesar 9.041.475 ton pupuk ditambah 1,5 juta liter pupuk organik cair.

Sebelumnya, Kementan menambah ketersediaan pupuk bersubsidi tahun 2021. Tercatat, alokasi pupuk bersubsidi ditambah sehingga menjadi 9 juta ton plus 1,5 juta liter pupuk organik cair, sedangkan tahun 2020 alokasinya hanya 8,9 juta ton.

"Semoga lebih banyak petani yang bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Dan pastinya petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi itu petani yang sudah tercatat di e-RDKK sesuai pengajuan yang diterima Kementan dari usulan pemerintah daerah," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

■ antara ed: citra listya rini

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 25/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 12 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☒ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

Bisnis Pupuk Non-Subsidi Masih Subur

Presiden minta program subsidi pupuk dievaluasi

Arfiana Citra Rahayu

JAKARTA. Implementasi subsidi pupuk masih memantik polemik. Presiden Joko Widodo sempat mengkritik penyaluran subsidi pupuk sebesar Rp 33 triliun tak mampu mendorong produksi pertanian. Di sisi lain pupuk subsidi di tingkat petani masih langka.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta ada evaluasi terhadap program subsidi pupuk. Presiden berharap subsidi pupuk yang nilainya cukup besar tersebut dapat menghasilkan produk pertanian secara maksimal.

Head of Corporate Communication PT Pupuk Indonesia (Persero), Wijaya Laksono menyebutkan, untuk memperoleh pupuk subsidi, maka petani mesti memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020. Salah satu ketentuan itu adalah petani harus terdaftar dalam kelompok tani yang menyusun

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Selain itu, subsidi ini untuk daerah tertentu dan penerima harus mempunyai Kartu Tani.

E-RDKK semacam proposal pengajuan yang harus disiapkan kelompok tani sebagai dasar bagi dinas pertanian untuk menentukan kebutuhan pupuk di suatu daerah.

Ada pula batasan alokasi pupuk bersubsidi bagi setiap daerah. Adapun jumlah alokasi tersebut berdasarkan rekomendasi dari Kementan agar penggunaan pupuk lebih efisien dan tepat guna. "Temuan kami di lapangan, rata-rata yang mengeluhkan kesulitan pupuk bersubsidi adalah yang belum terdaftar di e-RDKK, sehingga memang tak berhak dan tak dilayani," klaim Wijaya kepada KONTAN, Jumat (22/1) pekan lalu.

Kemudian, ada petani yang merasa jatahnya tak sesuai kebutuhan atau keinginan. Di beberapa daerah memang sempat ada keterlambatan penebusan dari distributor

karena menunggu SK alokasi di daerah tersebut. Saat ini, Pupuk Indonesia sudah menyiapkan stok 2,5 kali lipat dari ketentuan pemerintah atau cukup untuk kebutuhan sebulan ke depan.

Kapasitas produksi pupuk secara grup sebanyak 13,9 juta ton per tahun. Adapun untuk kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2021 berdasarkan alokasi pemerintah adalah sekitar 9 juta ton.

Pupuk non-subsidi

Di sisi lain, peluang bisnis pupuk non subsidi masih terbuka. Sekretaris Perusahaan PT Petrokimia Gresik, Yusuf Wibisono menjelaskan, berdasarkan usulan e-RDKK, kebutuhan pupuk petani sebanyak 23 juta ton. Sementara pemerintah mengalokasikan pupuk subsidi 9 juta ton dan 1,5 juta liter pupuk organik cair. Artinya, masih ada selisih 12,5 juta ton pupuk.

"Ini peluang sangat besar bagi produsen untuk memaksimalkan penjualan pupuk

non-subsidi. Begitu pula untuk kebutuhan sektor perkebunan dan ekspor, semua masih sangat prospektif," jelas dia, Jumat (22/1) lalu.

Sekretaris Perusahaan PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) Dadang Suryanto mengatakan, pasar pupuk di Indonesia masih berpotensi tumbuh tinggi, mengingat saat ini masih ada gap cukup besar antara kebutuhan pupuk NPK non-subsidi dan penggunaan pupuk NPK subsidi.

Sejak kuartal III 2020, SAMF telah menambah mesin baru yang membantu mengerek kapasitas produksi dari 440.000 ton per tahun menjadi 600.000 ton per tahun.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☒ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☒ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 24/1/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 2 / 1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☒ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika	☐ Fajar	☐ Pojok/Karikatur

Kementan Siapkan Strategi Hadapi Krisis Pangan

Sikapi peringatan FAO, Indonesia bakal menggenjot kapasitas produksi melalui perluasan areal budi daya baru untuk sejumlah komoditas strategis.

M ILHAM RA

ilham@mediaindonesia.com

MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan Indonesia tengah berupaya menjamin ketersediaan pangan di masa pandemi covid-19 dan di tengah ancaman perubahan iklim.

Dalam pertemuan the 13th Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) secara virtual, Jumat (22/1), Syahrul menguraikan sejumlah langkah yang diambil menuju ketahanan pangan mandiri dan modern.

"Kementerian Pertanian menetapkan arah kebijakan yang mendukung arahan Presiden, yaitu pertanian Maju Mandiri Modern melalui Cara Bertindak (CB) 1 sampai 5. Arah kebijakan tersebut menjadi pedoman bertindak cerdas, cepat, dan tepat," tuturnya lewat siaran persnya, kemarin.

Ia menjelaskan, pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia membuat ekonomi di banyak negara mengalami pelemahan yang signifikan. Kondisi itu menimbulkan beragam krisis, salah satunya di sektor pangan. Bahkan, Food and Agriculture Organization

(FAO) telah mengeluarkan peringatan untuk mewaspadai kemungkinan adanya krisis pangan tersebut.

Dalam pertemuan GFFA yang dihadiri pejabat setingkat menteri dan wakil menteri dari 97 negara serta perwakilan 13 organisasi internasional tersebut, Syahrul memaparkan langkah yang telah disusun pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah serta ekspor komoditas pertanian. *24-1/2*

"Pertama, meningkatkan kapasitas produksi melalui perluasan areal budi daya baru untuk komoditas strategis. Kedua, mendorong diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal melalui pemanfaatan pekarangan dan lahan marginal," urai Syahrul.

Berikutnya, memperkuat cadangan pangan dan sistem logistik. Keempat, mengembangkan pertanian modern melalui mekanisasi pertanian, *food estate*, dan korporasi petani, serta yang kelima ialah gerakan peningkatan ekspor komoditas pertanian.

"Melalui upaya-upaya tersebut, sektor pertanian terbukti mampu menjadi penyelamat perekonomian Indonesia di tengah kondisi sulit

yang menyebabkan berbagai sektor nyaris lumpuh. Hal itu terlihat dari peningkatan kontribusi pada produk domestik bruto (PDB) di triwulan III 2020 yang menguat menjadi sebesar 14,58%," ujarnya.

Diversifikasi pangan

Di kesempatan berbeda, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan, pemerintah harus mewaspadai pengaruh perubahan iklim terhadap produksi pangan di tengah situasi pandemi.

Diversifikasi pangan, sambungnya, menjadi kunci penting untuk menghadapi ancaman perubahan iklim. Itu dapat dilakukan dengan membudidayakan pangan lokal yang saat ini tampak diabaikan.

"Pangan lokal di tiap wilayah Indonesia itu harusnya dipandang sebagai kekuatan. Uniknya Indonesia, ragam pangan itu terbentang dari timur ke barat. Andaikan dalam jangka panjang itu dijadikan kekuatan, saya rasa kita tidak akan khawatir kalau pangan pokok seperti beras akan kurang karena terdampak perubahan iklim," ujarnya saat dihubungi, kemarin.

Penguatan pangan lokal yang akan

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☒ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 24/1/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 2 /
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☒ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika	☐ Fajar	☐ Pojok/Karikatur

mendorong diversifikasi pangan, kata Said, akan membuat sektor pangan nasional berdaya tahan. Itu pula akan mengikis sentralisasi pangan nasional yang saat ini masih terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa. (E-2)

Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Meningkatkan Produksi Pertanian



- 1 Meningkatkan kapasitas produksi melalui perluasan areal budi daya baru untuk komoditas strategis.
- 2 Mendorong diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal melalui pemanfaatan pekarangan dan lahan marginal.
- 3 Memperkuat cadangan pangan dan sistem logistik.
- 4 Mengembangkan pertanian modern melalui mekanisasi pertanian, food estate, dan korporasi petani.
- 5 Gerakan peningkatan ekspor komoditas pertanian.

Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (yoy)

(Data BPS pertumbuhan ekonomi triwulan III 2020)



Pertanian:
2,5%



Pertambangan
dan penggalian:
-4,28



Industri
pengolahan:
-4,31%



Konstruksi:
-4,51%



Perdagangan
dan reparasi:
-5,03%

Lainnya:
-4,07%

Sumber: Kementerian Pertanian/BPS/Litbang M

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☒ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 23/1/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 13/1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☒ Kontan	☐ Republika	☐ Fajar	☐ Pojok/Karikatur

Harga Daging Sapi Naik, Bawang Siap Mengekor

Harga daging sapi saat ini sudah masuk ke level yang mengkhawatirkan

**Vendy Yhulia Susanto ,
Lidya Yuniartha Panjaitan**

JAKARTA. Sejak awal tahun, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga. Setelah harga kedelai dan cabai yang meroket di pasaran, kini harga daging sapi yang mendaki. Bahkan, harga bawang putih berpotensi naik bila pemerintah tidak mengantisipasi dengan baik.

Kenaikan harga daging sapi telah memicu aksi mogok berjualan pedagang di wilayah Jabodetabek pada 20-22 Januari 2021. Sebab, harganya melonjak terlalu tinggi.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (Ikappi) Abdullah Mansuri menyatakan, harga daging sapi saat ini sudah masuk ke level yang cukup mengkhawatirkan jika terus menerus dibiarkan. "Saat ini di pasaran, harga daging sapi mencapai Rp 120.000 hingga Rp 130.000 per kilogram (kg)," ujarnya kepada KONTAN, Rabu (20/1).

Padahal sebelumnya, maksimal harga daging sapi Rp 120.000 per kg, itu pun untuk daging kualitas nomor satu. Sedangkan harga rata-rata daging sapi kualitas satu di Jakarta sekarang bisa mencapai Rp 135.00 per kg.

Meski harga tinggi, sejatinya pasokan daging sapi masih aman. Menurut Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kemtan) Fadjar Sumping Tjatur Rasa, tahun ini pasokan daging sapi dan kerbau 473.814 ton.

Jumlah itu berasal dari produksi di dalam negeri sebesar 425.978 ton serta *carry over* daging sapi dan kerbau impor juga daging bakalan dari tahun lalu 47.836 ton.

Sementara kebutuhan daging sapi dan kerbau di tahun ini mencapai 696.956 ton. Karena itu, Fadjar mengungkapkan, masih ada defisit daging sapi dan kerbau sebesar 223.142 ton pada 2021.

"Untuk memenuhi kekurangan daging tersebut, pemerintah akan melakukan impor sapi bakalan sebanyak 502.000 ekor atau setara daging 112.503 ton, impor daging sapi sebesar 85.500 ton, serta impor daging sapi Brasil dan daging kerbau India dalam keadaan tertentu 100.000 ton," kata Fadjar, Kamis (21/1).

Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) Didi Sumedi menyebutkan, harga daging sapi yang melonjak tinggi di pasaran lantaran ada kenaikan har-

ga sapi hidup impor asal Australia. Kenaikan harga tersebut akibat langkah repopulasi sapi di negeri kanguru.

Karena itu, Didi mengatakan, pemerintah berupaya mencari sumber lain, baik dari negara lain ataupun perusahaan daging beku dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan daging sapi tahun ini.

"Kami sedang menjajaki beberapa langkah ke depan, ter-

**Kenaikan harga
bawang putih
selalu terjadi
pada semester
pertama.**

utama dalam rangka mengisi stok di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang," imbuh Didi. RM 23/1/21

Stok bawang menipis

Bila kenaikan harga daging sapi sudah terjadi dan harus diatasi segera, maka selanjutnya pemerintah mesti mencegah sekaligus mengantisipasi potensi lonjakan harga bawang putih ke depan.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 23/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 13/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☒ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

Deputi Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Taufik Ariyanto mengungkapkan, hasil kajian lembaganya menemukan fakta bahwa kenaikan harga bawang putih selalu terjadi pada semester pertama setiap tahun sejak 2017. "Kalau kita lihat polanya, sejak 2017, 2018, 2019, 2020 selalu terjadi kenaikan harga di tiga atau empat bulan awal tiap tahun," ungkapnya, Jumat (22/1).

Bahkan di 2020, kenaikan harga bawang putih terjadi mulai Februari. Situasi ini akibat sumber utama impor komoditas tersebut di China mengalami *lockdown*, sehingga terjadi kesulitan logistik untuk melakukan importasi bawang putih awal 2020.

Taufik membeberkan, kajian KPPU, mengacu data dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kemtan dan impor dari Kemdag, memperkirakan stok

awal tahun ini mencapai 150.000-178.000 ton. Dan, berdasarkan masukan dari importir, KPPU menghitung, dalam skenario konsumsi tinggi di kisaran 48.000 ton per bulan dan belum ada pasokan impor, maka stok bawang putih di akhir Maret nanti hanya 6.484-16.120 ton. Artinya, stok penyangga bawang putih untuk awal April tidak akan mencukupi kebutuhan.

Sebelumnya, Dirjen Hortikultura Kemtan Prihasto Setyanto mengatakan, stok bawang putih di akhir 2020 lalu mencapai 134.000 ton. Ia memperkirakan, jumlahnya akan menyusut menjadi 85.000 ton di ujung Januari 2021. Lalu, akhir Februari tersisa 42.000 ton. Sehingga, untuk Maret dan April akan kekurangan bila tak ada impor. Sejauh ini, yang baru mengajukan impor ada lima perusahaan total 46.980 ton. ■

Proyeksi Kebutuhan, Produksi, dan Impor Pangan 2021 (ton)

Komoditas	Kebutuhan	Produksi Dalam Negeri	Defisit (Potensi Impor)
Daging Sapi	696.956	473.814	223.142
Bawang Putih	682.000	150.000	532.000
Gula Konsumsi	2.800.000	2.150.000	750.000

Sumber: Kemtan, BPS, dan Riset KONTAN

Harga Kedelai Dunia Mulai Turun

Sempat mencapai titik tertinggi, harga kedelai berjangka di bursa di Chicago, Amerika Serikat, turun lebih dari 4 persen menjadi sekitar 13,5 dollar AS per gantang (27,2 kilogram) pada perdagangan Sabtu (23/1/2021). Pada 14 Januari 2021, harganya mencapai titik tertinggi sejak Juni 2014, yakni lebih dari 14 dollar AS per gantang dan berdampak ke

Indonesia dan sempat diprotes produsen tahu dan tempe Tanah Air. *Tradingeconomics.com* menyebut, penurunan harga pada pekan ketiga Januari dipicu hujan di Argentina yang meningkatkan prospek hasil panen dan mengurangi kekhawatiran tentang pasokan kedelai global. Argentina bersama Brasil dan AS merupakan produsen utama kedelai dunia. (MKN) K-16

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 25/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 11 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

Sektor Pertanian Harus Waspadai Cuaca Ekstrem

JAKARTA-Sektor pertanian harus mewaspadai cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini. Sejumlah strategi harus dilakukan pemerintah agar produksi pertanian tetap terjaga, mulai dari percepatan masa tanam, pembangunan infrastruktur air, penerapan asuransi banjir, hingga penyediaan pupuk yang mencukupi. Informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) harus menjadi acuan saat penerapan strategi tersebut.

BMKG menyatakan, terdapat enam faktor yang menyebabkan curah hujan ekstrem di beberapa wilayah di Indonesia pada periode Januari-Februari tahun ini. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, faktor itu adalah fenomena iklim global La Nina, angin monsun asia, gelombang atmosfer Madden-Julian Oscillation (MJO), gelombang Kelvin dan Rossby yang membantu meningkatkan curah hujan, menghangatnya muka air laut di perairan Indonesia, dan bibit siklon dan siklonik. "Keenam faktor tersebut mempengaruhi tingginya curah



Dwikorita Karnawati

hujan di wilayah Indonesia dalam beberapa minggu belakangan ini," ujar dia di Jakarta, kemarin.

Ekonom Indef Fadhil Hasan mengatakan, cuaca ekstrem atau curah hujan yang cukup tinggi memang bisa memberikan dampak buruk terhadap ketahanan pangan Indonesia. Jika tidak diperhatikan maka akan banyak sekali panen petani yang gagal akibat cuaca ekstrem. "Untuk itu, pemerintah harus menjaga agar produksi pangan tetap terjaga

dengan baik. Cuaca ekstrem bisa menjadi salah satu faktor yang menghancurkan ketahanan pangan jika kondisinya berkelanjutan, inilah yang harus diantisipasi," ujar dia, Minggu (24/1).

Fadhil menjelaskan, diperlukan strategi yang pas untuk menjaga ketahanan pangan di tengah cuaca yang tidak menentu. Strategi itu di antaranya percepatan masa tanam, pembangunan infrastruktur air, dan petani didorong menggunakan patokan cuaca dari BMKG di lapangan untuk berjaga-jaga. "Petani harus dipastikan sudah menggunakan asuransi banjir untuk melindungi tanamannya. Kesiapan pupuk juga dibutuhkan untuk menjaga produksi pangan, pemberian pupuk harus dilakukan teratur dan terjadwal," kata dia.

Kementerian Pertanian (Kementan) sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi cuaca atau iklim ekstrem tahun ini, yakni percepatan musim tanam dan menyamakan validasi cuaca dengan BMKG. Strategi tersebut sudah dirancang dan dijalankan sejak 2020. "Selama ini, kita selalu masalah

cuaca dan hama. Karena itu, kita lakukan *mapping* serta kerja sama dengan BMKG. Yang pasti kita terus bergerak cepat. Mudah mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan bukan hanya beras yang terpenuhi, tapi komoditas lain selalu tersedia. Kita hanya perlu melakukan intervensi agar produksi pangan 2021 berjalan dengan lancar serta sesuai harapan. Insyaallah cuaca bisa kita kendalikan," ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Keberhasilan Indonesia dalam menjaga ketersediaan pangan pada 2020 adalah modal utama dalam melakukan fokus kerja tahun ini. Karena itu, pendekatan kerja yang diambil harus berjalan efektif dan efisien. Mentan menjelaskan, ketersediaan beras hingga pertengahan 2021 dalam posisi aman, stok akhir Juni 2021 akan berada di level 9,50-10,50 juta ton. Stok sebanyak itu dari produksi Januari-Juni 2021 sebanyak 18,50 juta ton ditambah stok awal Januari 2021 sebesar 6-7 juta ton, sedangkan konsumsi Januari-Juni 2021 hanya 15 juta ton. (dho)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 25/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

Redefinisi Swasembada Daging

KHUDORI, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Perubahan perilaku konsumsi, mengubah pola swasembada. Dalam konteks daging, tak lagi swasembada daging sapi, tapi swasembada daging.

Masalah berulang: pedagang daging sapi mogok jualan. Masalahnya sama dengan perajin tahu-tempe yang mogok jualan awal Januari 2021: harga naik. Harga daging di tingkat eceran Rp 130 ribu per kilogram (kg), melonjak tinggi ketimbang tahun 2020.

Tatkala daya beli masyarakat belum pulih, pedagang dilematis. Jika tetap berjualan, pembeli sepi karena harga tak terjangkau. Jika tidak berjualan, dapur tidak mengebul.

Dampak ikutannya, pedagang kecil pengguna daging sapi sebagai bahan baku, seperti tukang bakso, penjual rawon, tak bisa berjualan. Ini berulang jika akar masalah tak diselesaikan: ketergantungan pada daging impor, baik daging beku maupun sapi hidup.

Swasembada daging sapi dicanangkan sejak tahun kedua Presiden SBY menjabat, yaitu pada 2005. Sampai SBY lengser, belum tercapai. Target swasembada diteruskan Presiden Jokowi, tetapi juga belum bisa diraih. Ketergantungan impor masih tinggi, 30-39 persen.

Kenaikan harga daging kali ini terjadi karena dua hal. Pertama, harga sapi hidup di pasar dunia naik. Pada Juli 2020, rerata harga sapi hidup 3,6 dolar AS per kg, saat ini 3,95 dolar AS per kg, di luar biaya transportasi dan bongkar-muat di pelabuhan.

Australia sebagai pemasok utama daging ke Indonesia, sedang memulihkan populasi

ternaknya. Di sisi lain, permintaan tinggi datang dari kompetitor Indonesia, yakni Cina. Ditambah guncangan rantai logistik global, harga sapi hidup pun terkerek tinggi.

Kedua, rantai pasok tidak efisien dan jauh dari keadilan. Menurut data Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), memakai kurs referensi BI, harga sapi hidup saat ini setara Rp 55.556 per kg.

Daya beli yang sanggup diserap pemotong berkisar Rp 50 ribu per kg. Karena itu, Gapuspindo menjual rugi, rerata Rp 8.000 per kg. Di sisi lain, harga karkas di distributor Rp 125 ribu-Rp127 ribu per kg. Artinya, distributor mengambil margin amat tinggi: 25-27 persen per kg.

Hal ini tak adil karena pelaku yang punya jasa paling besar justru menerima margin kecil, bahkan merugi. Karena itu, pada tempatnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Satgas Pangan Polri turun tangan menyelidiki masalah ini.

Ini penting untuk memastikan tak ada pihak mengeruk keuntungan besar di tengah kondisi susah karena pandemi, juga memastikan margin keuntungan para pihak proporsional sesuai jasa dalam distribusi.

Idealnya, peternak dan pelaku usaha seperti Gapuspindo mendapat margin proporsional. Di luar itu, seperti ini, kita mesti mendefinisikan swasembada daging. Selama ini, sebagai konsumen, kita menganggap daging sapi tak tersubstitusi.

Pada hal, konsumsi daging sapi rata-rata warga Indonesia rendah, yakni 2,61 kg per

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

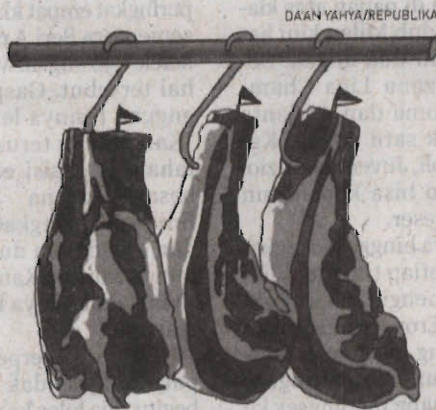
MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 25/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

kapita per tahun. Jauh dibandingkan Filipina (7 kg), Singapura (15 kg), apalagi Argentina (55 kg). Konsumsi daging sapi tertinggal dari konsumsi daging ayam per kapita: 10-11 kg per tahun.

Sejauh ini, tingkat partisipasi konsumsi warga terhadap daging sapi juga rendah, yaitu 15,2 persen, bandingkan dengan daging unggas yang mencapai 65,56 persen dan telur ayam 80 persen. Ini karena daging sapi komoditas *high income elastic*.

Daging sapi dikonsumsi golongan rumah tangga berpendapatan menengah ke atas.



Jika diselami lebih dalam, angka 15,2 persen itu pun terkonsentrasi di Jabodetabek. Deretan fakta itu menuju satu hal, mendorong konsumsi daging sapi, langkah yang salah.

Daging unggas, plus telur ayam, terbukti mampu mendukung ketahanan pangan hewan daging asal ternak domestik, mudah diakses dan terjangkau masyarakat, serta sumber protein murah.

Jika tujuan swasembada daging sapi memperluas akses masyarakat ke sumber protein dengan harga terjangkau, langkah itu tidak tepat. Mendorong konsumsi daging sapi juga mengancam keseimbangan pangsa komoditas daging.

Keseimbangan pangsa komoditas daging (sapi, kerbau, domba, dan unggas) perlu dijaga untuk mempertahankan eksistensi setiap sumber daging. Kondisi seimbang akan mem-

pertahankan diversifikasi pangan daging asal ternak.

Kalau orientasinya kelezatan, bukankah banyak jenis daging lain yang bisa diolah sebagai pengganti daging sapi? Satai ayam atau daging kelinci tak kalah lezat, bahkan lebih enak, ketimbang satai daging sapi. Lebih dari itu, harganya lebih murah.

Kalau tujuannya kandungan gizi sumber protein, bukankah banyak sumber protein yang setara bahkan lebih tinggi daripada daging sapi, seperti daging ayam, telur, dan aneka jenis ikan (belut, gabus, dan lele misalnya), dengan harga yang tak membuat kantong jebol?

Ketika konsumen beralih ke komoditas lain, dengan sendirinya permintaan atas daging sapi turun. Sesuai hukum *supply-demand*, ketika *demand* menurun harga juga akan mengikuti.

Perubahan perilaku konsumsi ini, mengubah pola swasembada yang selama ini terjebak pada komoditas. Dalam konteks daging, tak lagi swasembada daging sapi, tapi swasembada daging atau swasembada protein.

Setiap daerah dengan potensi khas lokal, bisa menyumbang target swasembada daging nasional. Ketika salah satu jenis komoditas daging harganya naik, tak membuat isi Republik ini resah karena warga bisa beralih ke aneka daging pengganti, tanpa terjebak daging sapi. ■

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 23/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

GEJOLAK HARGA PANGAN

Habis Kedelai, Terbitlah Daging Sapi

Setelah produsen tahu tempe di tiga hari pertama 2021, kali ini giliran pedagang daging sapi yang mogok massal, khususnya di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Mereka kompak tidak berjualan selama tiga hari hingga Jumat (22/1/2021). Aksi digelar sebagai protes pedagang atas tingginya harga daging sapi impor.

Los-los daging di sejumlah pasar tradisional tampak tidak biasa. Tidak ada daging potongan yang digantung, meja-meja dagangan bersih, timbangan teronggok, tidak terdengar suara golok menghantam talenan kayu, dan riuh transaksi jual beli. Hanya sebagian pedagang dan pekerja yang bercengkerama, menongkrong santai, atau tiduran.

Harga daging sapi di Jakarta, menurut sejumlah pedagang, terus naik 3-4 bulan terakhir. Harga beranjak dari Rp 80.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 120.000 per kg hingga Rp 150.000 per kg pertengahan Januari 2021. Margin yang diperoleh pedagang terus menipis karena harga beli daging sapi terus naik, sementara harga jualnya di tingkat konsumen cenderung stabil.

Stabilitas harga itu, antara lain, terekam di data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional. Selama September 2020 hingga Januari 2021, misalnya, rata-rata harga daging sapi secara nasional naik tipis (0,8 persen) dari kisaran Rp 118.000 per kg menjadi Rp 119.000 per kg.

Rentang kenaikan lebih tinggi terjadi di DKI Jakarta, yakni dari Rp 126.000 per kg menjadi Rp 129.000 per kg (naik 2,3 persen), serta di Jawa Barat, yakni dari Rp 121.000 per kg menjadi Rp 125.000 per kg (naik 3,3 persen) selama periode itu.

Wajar saja pedagang menjerit. Mereka terdampak kenaikan harga sapi bakalan di hulu, tetapi di

hilir tak kuasa mendongkrak harga jual. Selain faktor permintaan yang lesu di tengah pembatasan pergerakan masyarakat dan penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19, harga acuan penjualan di tingkat konsumen ditetapkan pemerintah Rp 80.000 per kg hingga Rp 105.000 per kg, lebih rendah dari harga pasar dan dianggap turut menekan margin, meski dalam banyak situasi harga acuan sering "dikangkangi" mekanisme pasar.

Kenaikan harga di hulu terutama dipengaruhi oleh situasi di Australia, negara utama sumber sapi bakalan dan daging sapi bagi Indonesia, yang setahun terakhir mengurangi ekspor guna memulihkan populasi (*restock*) sapi. Populasi sapi di sejumlah industri peternakan di Australia dilaporkan sekitar 30 persen dari kapasitas dan mendorong harga sapi ke level tertinggi sepanjang sejarah (*Kompas*, 21/1/2021).

Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia memperkirakan ekspor sapi bakalan Australia turun dari 1,3 juta ekor tahun 2019 menjadi 900.000 ekor tahun 2020, sekitar 60 persennya diserap Indonesia. Dampaknya segera merembet ke Indonesia, harga beli sapi naik dari 3,2 dollar AS per kg bobot hidup pada Juli 2020 menjadi 3,9 dollar AS per kg bobot hidup pada Januari 2021.

Jabodetabek menjadi wilayah yang rentan terdampak gejolak harga daging impor. Sebab, selain jadi titik konsentrasi konsumen daging, wilayah ini mengandalkan suplai sapi dari luar provinsi dan luar negeri. Oleh karena itu, gejolak kali ini lebih terasa di Jabodetabek ketimbang wilayah lain.

Tidak ada data pasti seberapa besar porsi daging impor dalam struktur konsumsi daging sapi di Indonesia. Soal populasi sapi nasional pun tak ada satu data yang diakui bersama akurasi. Namun, berdasarkan hitungan sejumlah asosiasi dan pelaku usaha, pasokan sapi lokal diperkirakan memenuhi 50-60 persen kebutuhan daging dalam negeri. Artinya, Indonesia masih perlu mengimpor



KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☒ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 23/1/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 9 /
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☐ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☒ Opini/Artikel
☒ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika	☐ Fajar	☐ Pojok/Karikatur

40 persen kebutuhan dagingnya.

Sebagaimana kedelai, gejolak harga daging sapi kali ini kembali mengirim pesan kuat ke pemerintah soal pentingnya menjaga kemandirian dan kedaulatan pangan. Jika tidak ingin terombang-ambing oleh situasi di luar, Indonesia mesti menekan impor dan memperkuat produksi daging di dalam negeri.

Data Kementerian Pertanian dalam Outlook Daging Sapi 2019 menyebutkan, pertumbuhan produksi daging sapi nasional selama kurun 1984-2019 rata-rata 2,34 persen per tahun. Namun, rata-rata pertumbuhan produksi selama 2010-2019 hanya 1,41 persen per tahun. Sementara konsumsi daging sapi per kapita selama 2010-2019 rata-rata tumbuh 2,04 persen. Artinya, selain melambat, pertumbuhan produksi daging sapi lebih rendah dibandingkan pertumbuhan konsumsinya. Dampak lanjutannya, demi menutup defisit, impor daging dipas-

tikan naik.

Ada sejumlah problem yang sering disuarakan oleh peternak sapi di dalam negeri. Intinya, insentif yang mereka peroleh rendah sehingga gairah untuk meningkatkan produksi berkurang. Ironisnya, insentif peternak berkurang atau bahkan hilang justru karena dampak kebijakan yang diambil oleh pemerintah sendiri.

Kebijakan impor daging kerbau dari India guna menekan harga daging di tingkat konsumen, misalnya, justru mempersempit pasar daging sapi lokal. Langkah impor demi menekan harga itu justru dianggap kontraproduktif bagi upaya memacu populasi sapi di dalam negeri. Peluang peternak untuk mendapatkan untung dalam setahun pun menyempit hanya saat menjelang kurban di hari raya Idul Adha.

Di hilir, penetapan harga acuan penjualan dianggap kurang menguntungkan peternak di hulu sebab kurang ideal dibandingkan ongkos produksi. Kebijakan berorientasi konsumen ini perlahan mematikan pelaku di hulu yang lebih dari 90 persennya diisi peternak skala kecil. Belum lagi soal bocornya daging impor ke pasar "becek" yang selama ini menjadi lapak daging sapi lokal.

Problem lain, seperti keterbatasan bibit, modal, dan lahan pakan, tak kalah mendasar penyelesaiannya. Namun, pemerintah bisa memulai dengan memikirkan keuntungan peternak sebagai prioritas. Sebab, jika peternak untung atau memperoleh insentif yang layak atas usahanya, yakinlah populasi sapi dan produksi daging sapi nasional bakal meningkat dan tumbuh dengan solid.

Sebaliknya, jika terus mengandalkan daging impor guna menutup defisit serta mengabaikan insentif dan kesejahteraan peternak sapi di dalam negeri, Indonesia bakal terjebak semakin dalam di jurang ketergantungan.

(MUKHAMAD KURNIAWAN)



SUPRIYANTO

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL 25/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 4 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

Subsidi Pertanian Naik, Produksi Pangan Stagnan



MASBANTAR SANGADJI

Peneliti di Ruang Lestari Indonesia, Mahasiswa Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Sekolah Pascasarjana IPB

Kebijakan anggaran untuk subsidi pertanian setiap tahun meningkat namun tidak diikuti dengan lompatan produksi hasil pertanian. Faktanya Indonesia tetap melakukan Impor pangan beras, kedelai dan pangan lainnya dari berbagai negara untuk memenuhi konsumsi pangan nasional. Padahal setiap rupiah yang dialokasikan dan setiap sumberdaya yang dikerahkan harapannya dapat meningkatkan produksi dan juga kesejahteraan petani.

Kebijakan subsidi pupuk diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional. Harapan publik dari kebijakan subsidi pertanian adalah terwujudnya swasembada pangan sehingga setiap rumah

tangga mendapat akses pangan dengan mudah dan mutu yang baik. Kebijakan subsidi pertanian yang selama ini berlangsung belum menunjukkan derajat mutu implementasi yang baik dalam efektivitas maupun juga efisiensi. **Sl. 9**

Anggaran subsidi pupuk konsisten naik menurut data Kementerian Keuangan. Pada 2014 dialokasikan Rp21,04 triliun. Selanjutnya pada 2019 naik menjadi Rp34,3 triliun. Selama periode pertama, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah menggelontorkan anggaran subsidi pupuk sekitar Rp175 triliun. Pada saat yang sama, data *Food and Agriculture Organization* (FAO) menunjukkan produksi sejumlah komoditas stagnan bahkan menurun. Misalnya, produksi padi yang stagnan di angka 59 juta ton selama periode pertama dan turun menjadi 54 juta ton pada 2019. Jika dirata-rata sejak 2015 hingga 2019, tiap tahun ada penurunan produksi padi sebesar 0,22%.

Saat ini juga terjadi kelangkaan kedelai. Pada 2014 produksinya 954.000 ton, lalu turun ke 538.000 ton pada 2017. Pada 2019 produksi sempat naik menjadi 940.000 atau tetap lebih rendah ketimbang lima tahun sebelumnya.

Hasil Produksi tersebut belum memenuhi kebutuhan nasional sehingga kekurangannya dipenuhi dari impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik

(BPS) impor beras Indonesia sejak 2000 hingga 2019 fluktuatif. Impor beras pada 2019 yakni 444,500 ton. Sedangkan impor kedelai Indonesia mencapai 2 juta-2,7 juta ton per tahun.

Fakta tersebut memberikan pertanyaan besar bahwa sebenarnya tujuan subsidi pupuk itu untuk apa? Ketidamampuan negara dalam meningkatkan produksi pertanian menimbulkan sejumlah ragam pertanyaan yang sekiranya perlu jadi bahan evaluasi oleh Kementerian Pertanian, di antaranya apakah pola subsidi yang dilakukan selama ini sudah baik? Apakah mekanisme penyaluran sudah berjalan baik? Apakah implementasi di lapangan lancar atau tidak lancar? Apakah penyalurannya sudah tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah, tepat penggunaan? Apakah subsidi yang sudah berjalan selama ini perlu diubah, kalau perlu apa yang diubah? Lalu, caranya seperti apa dan petunjuknya bagaimana? Tata kelolanya seperti apa, dan aspek kelembagaannya bagaimana?

Seringkali penyaluran pupuk tidak tepat waktu, tidak tepat jumlah, tidak tepat jenis, tidak tepat harga, tidak tepat sasaran dan juga rawan terjadi penyelewengan. Hal ini disebabkan karena persolan manajemen dan ketidakmampuan untuk merencanakan dan me-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL 25/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

ingin implementasikan rencana. Selain itu ada pula persoalan di lapangan terkait gudang penyangga produsen langsung ke gudang distributor kemudian ke gudang pengecer dan langsung ke kelompok tani. Adajuga persoalan pengencer tidak resmi, ini merupakan persoalan *governance* di dalam rantai distribusi. Jadi kalau kapasitas pengelolaannya tidak diperbaiki maka akan terjadi manajemen berulang-ulang.

ada kontrol prestasinya? Misalkan, seseorang pergi bolak-balik Jakarta-Bogor 100 kali dengan menggunakan BBM subsidi dan orang tersebut tidak pernah dilarang. Tapi itu tidak mungkin dilakukan oleh petani dalam menggunakan pupuk bersubsidi. Tidak mungkin petani menggunakan pupuk 100 kali dalam sehari. Jadi di dalam subsidi pertanian adalah bagaimana petani melakukan kontrol prestasi.

Menyubsidi Pertanian atau Petani?

Jika menyubsidi petani itu lebih mudah, artinya kalau petani kurang *income* kasih saja uang tunai, kemudian selesai, atau cukup dengan memberikan saja ongkos transportasinya. Tapi kalau menyubsidi pertanian kita bicara bagaimana membangun pertanian, bagaimana mengembangkan pertanian, bagaimana membangun sebuah peradaban, membangun kemandirian bangsa, menjaga kedaulatan pangan dan ketahanan pangan, dan aspeknya lebih luas.

Banyak studi yang mengatakan bahwa kebijakan subsidi pertanian sudah lama berjalan, namun petani cenderung memakai pupuk kurang optimum atau lebih tinggi dari yang dibutuhkan. Pertanyaannya, siapa yang mendidik petani untuk menggunakan input secara baik dan benar? Ada yang mendidik tapi rumusnya se-Indonesia

samayakni 200 kg urea/hektare tanpa mengindahkan perbedaan cara tanam antarsatu komoditas dengan komoditas yang lain. Otomatis kalau di *sampling* pasti ada yang *over utilization*. Oleh karena itu jangan salahkan petani kalau mereka tidak menggunakan pupuk dengan benar, mengapa? Karena tidak mempersiapkan informasi yang tepat mengenai berapa komposisi pupuk yang harus dipakai untuk jagung, padi, kedelai. Jadi subsidi pupuk tidak bisa optimal kalau tidak tersedia informasi terkait bagaimana pupuk itu harus diaplikasikan oleh petani, berapa banyak dan bagaimana komposisi pupuk yang harus diberikan.

Selain itu subsidi pertanian tidak bisa optimal kalau pemerintah tidak melakukan intervensi di pasar *output*. Untuk itu pada prinsipnya *marginal product* harus sama dengan perbandingan harga input dengan harga *output*. Dampaknya, kalau harga input diturunkan atau harga *output* dinaikkan, *marginal product* semakin kecil. Oleh karena itu, meski petani meningkatkan produksi lebih banyak tapi kalau *output* lebih tinggi, yang terjadi adalah harga pada umumnya akan turun. Oleh karena itu subsidi input tanpa intervensi di pasar *output* akan menenggelamkan semangat aktivitas petani karena akan menurunkan disinsentif bagi mereka untuk memakai input berupa pupuk, benih, dan

bibit. Sebab, setelah memproduksi banyak, ternyata harganya turun dan tidak lagi terjadi elastisitas. Penurunan harga *output* jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah subsidi yang diterima. Dengan begitu harus dilakukan intervensi di pasar *output* dan teknologi diperkuat.

Untuk itu hal-hal yang perlu diperbaiki di antaranya, mengoptimalkan lembaga pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Selain itu sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Kartu Tani yang diterapkan Kementerian Pertanian (Kementan) sebaiknya dilengkapi dengan QR dan *barcode scanner* yang memuat informasi harga, cuaca dan informasi takaran penggunaan pupuk sesuai jenis komoditi. Lalu, menyusun pedoman kredibilitas penyalur (distributor dan pengecer) yang meliputi kemampuan permodalan, fasilitas, manajemen dan sumber daya manusia. Sumber pasokan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk pada masing-masing pulau harus mempertimbangkan efisiensi dari biaya transportasi. Selain itu, penentuan harga eceran tertinggi (HET) sebaiknya mempertimbangkan kondisi dan situasi wilayah. Dari situ dapat ditentukan HET berdasarkan regional.

Aspek perbaikan kapasitas pengelolaan dan *governance* dalam distribusi pupuk merupakan persyaratan utama. □



Subsidi pertanian sangat berbeda dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan jenis subsidi langsung yang diberikan tanpa bunga. Jika menyubsidi pertanian maka ada aspek pemberdayaan dan aspek peningkatan produksi. Sementara subsidi tidak langsung seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), pertanyaannya, apakah penggunaan BBM